

Beberapa Catatan Lepas Tentang Intelijen Kita

Alex Dinuth



Sejarah perjuangan Republik Indonesia membuktikan bahwa dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya bangsa Indonesia senantiasa mendasarkan diri pada semangat perjuangan seluruh rakyat yang didorong oleh perasaan senasib dan sepenanggungan serta sikap rela berkorban untuk tanah air.

Perkembangan serta pasang surutnya kehidupan berbangsa dan bernegara kita sejak awal revolusi fisik untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia terhadap berbagai rongrongan baik dari dalam maupun dari luar negeri, telah menumbuhkan kesadaran akan perlunya intelijen yang tangguh.

Aktivitas intelijen pada saat-saat menjelang dan setelah proklamasi maupun perkembangannya selama perang kemerdekaan menunjukkan bahwa memang telah terbentuk berbagai badan intelijen.

Badan-badan intelijen tersebut terus bertumbuh dan berkembang sejalan dengan kebutuhan situasi dan kondisi negara serta lingkungan strategis hingga saat ini.

Patut dicatat bahwa badan-badan intelijen itu terus berjuang tanpa pamrih dan tidak pernah surut dalam pengabdianya demi membela kepentingan maupun keselamatan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Walaupun perkembangan lingkungan strategis dan peningkatan perjuangan bangsa, menuntut penyesuaian-penyempurnaan dan penyempurnaan-penyempurnaan di semua strata badan intelijen, tetapi hingga saat ini, semuanya tetap utuh dalam suatu komunitas intelijen tanpa meninggalkan sejarah, tradisi, dan jiwa patriotisme serta doktrin yang menunjang profesionalismenya masing-masing.

Memang harus diakui, bahwa intelijen Negara Republik Indonesia juga mengadopsi asas-asas serta filosofi intelijen universal, tetapi dalam penerapannya telah disesuaikan dengan budaya dan karakter bangsa, pengalaman-pengalaman penugasan dalam kondisi kebhinekaan bangsa, luasnya geografis nusantara, serta pengaruh

lingkungan strategis yang sarwa berubah.

Keamanan dan Kepentingan Nasional.

Yang dimaksud dengan "aman" adalah suatu kondisi di mana tidak terdapat rasa takut karena tidak adanya ancaman atau gangguan terhadap nilai-nilai internal suatu bangsa, sehingga semua aktivitas negara dapat berlangsung secara tertib dan damai.

Hakekat keamanan nasional adalah suatu kondisi dinamis kedamaian dan ketentraman bangsa dan negara Indonesia yang merupakan hasil integrasi dan interaksi faktor dinamis yang memungkinkan seluruh rakyat berkembang sesuai kemampuan dan tuntutan hidup masing-masing dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Keamanan Nasional juga diartikan sebagai kondisi terselenggaranya kelangsungan hidup bangsa maupun negara sesuai amanat Pembukaan UUD '45 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang ber-

dasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Munculnya perubahan-perubahan perilaku ancaman serta perilaku keamanan itu sendiri, maka pengertian tentang keamanan juga semakin kompleks dan meluas.

Dalam berbagai kajian digarisbawahi bahwa sasaran utama keamanan adalah keamanan individual (kebebasan dan hak), keamanan masyarakat (nilai fisik dan psikologik), dan keamanan negara (tatanan kewenangan, kedaulatan, dan integritas wilayah).

Dapat dikatakan keamanan nasional sangat terkait dengan kepentingan nasional yang intinya, menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia (berdasarkan Pancasila dan UUD '45) serta terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Keamanan nasional juga dirumuskan sebagai keamanan suatu negara *plus core values* bangsa itu. Selanjutnya, upaya demi terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara diselenggarakan melalui pembinaan segenap aspek kehidupan bangsa, sedangkan upaya mewujudkan kesejahteraan

rakyat diselenggarakan melalui rangkaian pembangunan nasional.

Maka keamanan nasional menjamin integritas rakyat, pemerintah dan wilayah, eksistensi bangsa, kepentingan nasional serta kesinambungan perjuangan bangsa. Oleh sebab itu perwujudan dan peningkatan keamanan nasional perlu didukung oleh suatu sistem penyelenggaraan dan pembinaan intelijen negara secara profesional, modern, cerdas, efisien, efektif dan berlanjut. Sedangkan persyaratan utama dalam upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, adalah integritas nasional, tegaknya kedaulatan NKRI dan terciptanya stabilitas nasional yang dinamis.

Semua itu dapat terwujud dengan baik apabila intelijen negara sebagai bagian dari sistem keamanan nasional mampu melakukan deteksi dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman baik yang potensial maupun yang telah mengaktual.

Profesi Intelijen

Kemampuan profesional (*professional*)

competence) merupakan syarat mutlak menuju terbinanya sosok intelijen yang profesional. Di dalamnya terkandung kewajiban dan kemampuan untuk menegakkan etika profesi yang menjadikan intelijen sebagai profesi yang disegani, dipercaya dan terhormat, bukan profesi yang menimbulkan rasa takut dan benci pada masyarakat.

Profesionalisme intelijen merupakan kualitas dan tindak tanduk sebagai ciri mutu sosok intelijen yang profesional. Hal ini menyangkut sikap, cara berpikir, cara bertindak dan cara berperilaku serta bekerja atas dasar moralitas, etika profesi, dan kode etik intelijen yang ditaati secara tulus.

Kode etik intelijen disusun oleh komunitas intelijen sedangkan pelanggaran-pelanggaran terhadapnya ditangani langsung oleh Dewan Kehormatan Intelijen masing-masing pelaksanaan fungsi intelijen. Tentu sanksi tegas perlu dijatuhkan terhadap sosok intelijen yang melanggar sumpah intelijen maupun ketentuan-ketentuan dasar tugas pokok dan fungsi intelijen, sedangkan terhadap mereka yang berprestasi dalam tugasnya patut dicatat demi peningkatan karirnya.

Selain itu sebagai modal dasar bagi suksesnya para insan intelijen adalah penguasaan dan peningkatan kompetensi menyeluruh baik itu kompetensi teknis (pengetahuan dan keahlian) maupun kompetensi perilaku. Sangat diharapkan dari para insan intelijen adanya kemampuan untuk memberdayakan pengetahuan, keahlian, pengalaman bahkan inspirasi untuk menciptakan inovasi-inovasi dan kreativitas baru di bidang-bidang intelijen yang digelutinya.

Era digital dan *variable* ancaman *cyberspace* dewasa ini menuntut nilai tambah profesionalisme insan intelijen serta dukungan peralatan yang canggih pula.

Kini profesionalisme intelijen juga dituntut untuk menghormati demokrasi, supremasi hukum, hak-hak azasi manusia, nilai-nilai budaya dan sejarah yang ada, karena negara yang kita impikan bukanlah negara polisi (*police state*) atau negara kekuasaan (*machtstaat*) yang didukung oleh polisi rahasia seperti pada era Kempetai, Gestapo, GRU atau Stazei yang lalu.

Insan intelijen juga harus memiliki kemampuan spesialis kewilayahan nusantara, yang benar-benar faham

terhadap latar belakang sejarah serta kompleksitas masalah setiap daerah, sehingga analisisnya dapat membantu merumuskan cara dan bentuk pemecahan yang tepat terhadap setiap masalah kedaerahan.

Intelijen yang efektif ialah menyampaikan peringatan sebelum suatu peristiwa terjadi. Fungsi intelijen, ialah memberikan peringatan dini dan perkiraan (*warning and estimation*). Selain itu fungsi intelijen, menyampaikan fakta-fakta dan analisa intelijen untuk meyakinkan sang pengambil keputusan, antara lain tentang :

- Kemampuan lawan atau bakal lawan.
- Niat lawan atau bakal lawan.
- Kebijakan lawan atau bakal lawan.

Kegagalan sang pengambil keputusan dalam memanfaatkan bahan-bahan informasi serta analisa (intelijen) tersebut akan menelorkan suatu kebijakan yang salah dan gagal.

Dinamika Lingkungan Strategik

Salah satu aspek dominan yang sangat mempengaruhi kelangsungan

hidup dan perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dinamika lingkungan strategik yang di samping menawarkan peluang, secara pasti juga membawa potensi ancaman terhadap bangsa dan negara yang perlu diperhitungkan dengan seksama. Dapat disebutkan di sini: pemanasan global, krisis energi, krisis pangan dunia, dan masalah-masalah lingkungan hidup.

Kini Indonesia dihadapkan pada perubahan dan pergeseran-pergeseran peradaban dunia yang diakibatkan oleh globalisasi politik, kultural, teknologi dan ekonomi. Perubahan pada tataran global, regional dan nasional tersebut harus dihadapi bangsa Indonesia termasuk kemampuan beradaptasi, padahal solidaritas sosial dan soliditas bangsa masih digerogoti oleh berbagai faktor disintegratif.

Seperti disebutkan di atas, di samping membawa manfaat bagi kemajuan yang sejalan dengan kepentingan nasional, fenomena-fenomena tersebut juga membawa dampak negatif yang merugikan kehidupan bangsa dan negara yang pada gilirannya dapat menimbulkan gangguan serta ancaman terhadap keamanan nasional.

Memang spektrum potensi ancaman pun tidak lagi bersifat tradisional tetapi lebih diwarnai ancaman non tradisional. Sumber ancaman telah mengalami pergeseran makna bukan hanya meliputi ancaman internal dan atau luar, tetapi juga ancaman asimetris yang bersifat global tanpa bisa dikategorikan apakah itu ancaman dari luar atau dari dalam negeri. Watak dan wajah ancaman telah berubah menjadi multidimensional. Dengan demikian antisipasi terhadap berbagai ancaman nasional harus dilakukan secara lebih komprehensif baik dari aspek sumber, sifat, bentuk, kecenderungannya, maupun aspek isu yang sarwa cepat berubah. Sebagai misal, ancaman asimetris antara lain dalam bentuk propaganda isu penyesatan dan disinformasi melalui dunia maya pasti mengubah pola-pola klasik operasi intelijen yang telah kita kenal.

Contoh lain, perekrutan para teroris, *money laundering*, serta pendanaan terorisme melalui internet tentu merupakan tantangan terkini yang harus dihadapi dunia intelijen kita.

Dinamika globalisasi yang membawa perubahan atau "*change*", yaitu suatu kondisi yang tak mungkin dihindari

oleh siapa pun termasuk organisasi intelijen kita, merupakan bagian dari proses kehidupan yang perlu dihadapi secara bijak (termasuk tuntutan-tuntutan pembaharuan oleh proses reformasi yang masih berlangsung). Oleh karena itu kebutuhan intelijen strategis makin luas dan mendetail baik aspek ekonomi, politik, riset industri, komunikasi, sumber daya manusia maupun sosial budaya, pertahanan keamanan dsb.

Sebagai akibat dampak lingkungan strategis itu, kapasitas suatu organisasi (termasuk organisasi intelijen) harus mampu :

- Menciptakan perubahan.
- Memicu perubahan.
- Mengacu perubahan, dan
- Menyelesaikan perubahan.

Mungkin saja dalam bentuk perubahan struktural (institusi, organisasi), perubahan instrumental (filosofi, doktrin, wewenang, fungsi, iptek), atau perubahan budaya (SDM, manajemen operasional, sistem pengawasan).

Biasanya langkah-langkah perubahan dilakukan melalui manajemen perubahan dengan pendekatan struktural dan pendekatan yang memperhatikan

faktor-faktor pendukung dan penghambat.

Khususnya dalam menghadapi tuntutan perubahan tersebut, intelijen negara Republik Indonesia tetap berpegang pada sikap, yang konsisten terhadap tujuan, tetapi luwes dalam berpikir dan bertindak. Hal itu berarti intelijen negara Republik Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan fenomena tuntutan perubahan tanpa menyimpang dari tujuan "kepentingan nasional" yaitu terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara (berdasarkan Pancasila dan UUD '45) serta terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Kemudian, dalam menghadapi isu dan proses demokrasi yang kini sedang berlangsung di Indonesia kita patut waspada. Setiap negara mempunyai ciri demokrasinya masing-masing, yang berakar pada kebudayaan, tradisi dan lingkungan kehidupannya sendiri. Apabila bangsa Indonesia memilih bentuk demokrasi Pancasila, maka hal itu merupakan keputusan yang paling tepat. Kita tidak perlu meniru-niru bentuk demokrasi bangsa lain, bahkan lebih keliru lagi apabila ada bangsa lain yang memaksakan bentuk demokrasinya untuk diterapkan di Indonesia.

Dalam kehidupan berdemokrasi, setiap warga negara mempunyai hak untuk ikut andil secara aktif menumbuhkan mekanisme politik bangsa. Namun perlu diingat bahwa, meskipun kehidupan demokrasi yang berlandaskan pada prinsip kebebasan berpendapat dan kebebasan mengemukakan pikiran, etika atau sopan santun berpolitik di dalam kehidupan demokrasi (Pancasila) hendaknya selalu diperhatikan.

Terkait dengan proses demokrasi tersebut, intelijen negara tetap mendukung dan turut mensukseskan arah kebijakan pemerintah yaitu :

- Mewujudkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh dengan mempertegas tugas, wewenang dan tanggungjawab dari seluruh kelembagaan negara/pemerintah yang berdasarkan mekanisme *checks and balances* ;
- Memperkuat peran masyarakat sipil (*civil society*) ;
- Memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah ;
- Mewujudkan pelembagaan dan mendorong berjalannya rekonsiliasi nasional beserta segala kelengkapan kelembagaannya ; serta
- Menjamin pengembangan media

dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat.

Dalam konteks itu intelijen kita pun telah meninggalkan pendekatan-pendekatan kekerasan dan menggunakan paradigma: *SOFT APPROACH*. Intelijen juga sudah membangun dan meningkatkan analisis-analisis yang kompeten serta *human intelligence* yang efektif.

Kemudian dalam menghadapi tugas-tugas yang semakin berat dan kompleks, komunitas intelijen lebih disinergiskan secara berhasil guna. Dalam hubungan ini tentu perlu adanya penataan-penataan berlanjut sehingga analisis intelijen selalu berkualitas serta dapat dipercaya. Di sinilah peran riset, penelitian dan pengembangan intelijen.

Intelijen dan Transparansi

Ada sementara orang berpendapat bahwa di era keterbukaan, di era tuntutan demokratisasi, supremasi hukum, akuntabilitas dan hak asasi manusia, aktivitas badan-badan intelijen harus pula transparan. Ini pendapat yang keliru karena kalau

sudah transparan intelijen bukan lagi berstatus sebagai "*secret service*".

Selanjutnya dalam menghadapi *euphoria* demokrasi saat ini pihak intelijen pun perlu mengantisipasi adanya tuduhan-tuduhan dan kecurigaan-kecurigaan dari sebagian masyarakat terhadap badan-badan intelijen bahwa :

- Kegiatan intelijen cenderung digunakan untuk kepentingan politik penguasa atau politik praktis ;
- Adanya penyalahgunaan wewenang;
- Adanya tumpang tindih dalam penugasan antar badan-badan intelijen.
- Kurang Transparan.
- Adanya rivalitas antar badan-badan intelijen.

Oleh karena itu rencana Undang-undang Intelijen Negara yang sudah siap diajukan melalui mekanisme DPR RI yang kemudian akan disahkan oleh Presiden RI secara tegas menetapkan strata, posisi, fungsi, tugas, pengkoordinasian dan pembinaan komunitas badan-badan intelijen di Indonesia serta kewenangannya secara tepat.

Di dalam UU tersebut akan tercantum hal-hal apa saja yang dapat diungkap secara transparan dan apa yang tidak, misalnya berdasarkan UU In-

telijen, intelijen negara diperbolehkan merahasiakan hal-hal yang menyangkut organisasi, tugas, fungsi, personil (nama, jabatan, gaji, pembinaan, pengelolaan). Sedangkan, semua aktivitas yang dilakukan anggota intelijen adalah rahasia negara. Khususnya dalam rangka keselamatan, kesejahteraan, keamanan dan kepentingan negara, UU Intelijen akan menjamin akses aktivitas badan intelijen ke departemen/instansi pemerintah maupun swasta yang jelas-jelas berindikasi merugikan atau membahayakan keselamatan dan kepentingan negara.

Kemudian secara tegas digariskan pula wewenang serta wilayah kegiatan semua badan intelijen negara yang ada, maupun prosedur pengkoordinasian dan pembinaan komunitas intelijen sesuai doktrin intelijen yang berlaku.

Menyangkut pengawasan, pada prinsipnya DPR RI sebagai wakil rakyat dalam sistem demokrasi dapat melakukan pengawasan terhadap intelijen melalui prosedur dan mekanisme oleh suatu komisi khusus di mana para anggotanya diangkat dengan janji sumpah khusus yang diatur oleh Undang-Undang Intelijen Negara.

Pengawasan tersebut dilakukan secara tertutup tentang "apa" dan "mengapa" terhadap substansi kebijakan intelijen secara umum dan dukungannya yang berkaitan dengan keamanan nasional dan keselamatan warga negara, artinya bukan mengontrol secara teknis operasional maupun kegiatan intelijen secara rinci.

Informasi yang layak diketahui oleh Sub Komisi Intelijen DPR RI tersebut kerahasiaannya harus terjamin (oleh anggota DPR RI) sesuai UU Kerahasiaan Negara.

Catatan Akhir

Hal yang tak boleh terlewatkan dari perhatian kita adalah bidang pendidikan dan pelatihan (Diklat) dari STIN (Sekolah Tinggi Intelijen Negara, di Sentul – Bogor) sebagai "pabrik" SDM intelijen. Tentu semuanya berpatokan pada 3 Q, yaitu *Quality of Education* (kualitas pendidikan), *Quality of Operation* (kualitas operasional pendidikan), dan *Quality of Output* (kualitas lulusan).

Adalah ideal apabila Diklat digunakan atau dimanfaatkan oleh semua insan komunitas intelijen karena se-

cara garis besar memiliki kesamaan visi, misi, sistem rekrutmen dan sistem karir.

Kemudian, apa yang dimaksud dengan budaya organisasi? Secara singkat, nilai-nilai dan kebiasaan yang diterima, diikuti dan dihormati sebagai acuan bersama dalam suatu organisasi disebut budaya organisasi. Berkembang maupun tidak berkembangnya budaya organisasi sangat ditentukan oleh dinamika lingkungan strategik maupun kecerdasan pemimpinnya.

Dan pemberdayaan budaya organisasi intelijen bermakna, apabila memberikan kesempatan kepada organisasi

intelijen untuk lebih berperan dalam meningkatkan kinerja organisasi maupun insan intelijennya agar lebih profesional, dan bermoral.

Terakhir, di era reformasi ini Intelijen dan masyarakat harus tetap waspada terhadap berbagai upaya dan niat lawan untuk mengerdilkan intelijen, dan mengkebiri wewenangnyanya, serta ingin mengontrol sepenuhnya atas intelijen. Kita harus siap menghadapinya secara cerdas, tanpa menjerat diri sendiri, yaitu melalui manuver hukum dengan argumentasi logis, tepat dan mengena. Di sinilah perlunya kerjasama dan koordinasi yang erat antara institusi penegak hukum dengan institusi intelijen. □

